

**RESTRUKTURISASI ORGANISASI PEMERINTAH PROVINSI
KALIMANTAN BARAT BERDASARKAN PERATURAN
PEMERINTAH NOMOR 18 TAHUN 2016
TENTANG PERANGKAT DAERAH**

TESIS



Oleh :

AMRI PRATAMA
20131040036

**PROGRAM STUDI
MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA
2017**

**RESTRUKTURISASI ORGANISASI PEMERINTAH PROVINSI
KALIMANTAN BARAT BERDASARKAN PERATURAN
PEMERINTAH NOMOR 18 TAHUN 2016
TENTANG PERANGKAT DAERAH**

“Diajukan kepada Program Pascasarjana
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta untuk Memenuhi Salah Satu
Syarat Memperoleh Gelar dalam Magister Ilmu Pemerintahan”

TESIS



Oleh :

AMRI PRATAMA
20131040036

**PROGRAM STUDI
MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA
2017**

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING

**RESTRUKTURISASI ORGANISASI PEMERINTAH PROVINSI
KALIMANTAN BARAT BERDASARKAN PERATURAN
PEMERINTAH NOMOR 18 TAHUN 2016
TENTANG PERANGKAT DAERAH**

TESIS

Diajukan Oleh :

Nama : Amri Pratama

NIM : 20131040036

Telah disetujui oleh :

Dosen Pembimbing,



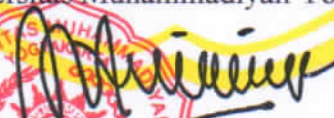
Dr. Dyah Mutiarin, M.Si

Mengetahui,

Ketua Program Studi

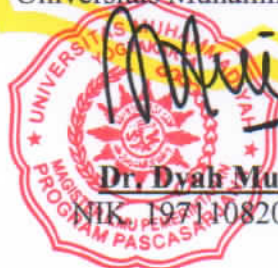
Magister Ilmu Pemerintahan

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta



Dr. Dyah Mutiarin, M.Si

NIM. 1971108201004 163 089



PENGESAHAN TIM PENGUJI

Judul : Restrukturisasi Organisasi Pemerintah
Provinsi Kalimantan Barat Berdasarkan
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
Tentang Perangkat Daerah
Ditulis Oleh : Amri Pratama
NIM : 20131040036
Pembimbing : Dr. Dyah Mutiarin, M.Si

Yogyakarta, September 2017



HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Amri Pratama

NIM : 20131040036

Menyatakan bahwa Tesis dengan judul **“Restrukturisasi Organisasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah”** adalah benar-benar hasil penelitian saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan penuh kesadaran.

Yogyakarta, September 2017

Yang Membuat Pernyataan



Amri Pratama

LEMBAR REVISI

Telah melaksanakan ujian tesis pada hari ini Sabtu, tanggal 02 September 2017, Jam : 10.00 Wib, bertempat di: Gedung Pascasarjana Lantai 2, Ruang : Studi Hall MIP Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, untuk diberikan persetujuan *Revisi Tesis*, atas nama :

Nama : Amri Pratama
NIM : 20131040036
Judul : Restrukturisasi Organisasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah

Pembimbing : Dr. Dyah Mutiarin, M.Si (.....)

Penguji I : Dr. Suranto, M.Pol (.....)

Penguji II : Dr. Ulung Pribadi, M.Si (.....)

Yogyakarta, September 2017

Ketua Program Studi
Magister Ilmu Pemerintahan
Program Pascasarjana
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta



Dr. Dyah Mutiarin., M.Si

NIM. 19711108 201004 163 089

PENGESAHAN PROGRAM STUDI

Judul : Restrukturisasi Organisasi Pemerintah Provinsi
Kalimantan Barat Berdasarkan Peraturan
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang
Perangkat Daerah

Ditulis Oleh : Amri Pratama

NIM : 20131040036

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar dalam
Magister Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Yogyakarta, September 2017

Ketua Program Studi
Magister Ilmu Pemerintahan
Program Pascasarjana
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta



Dr. Dyah Mutiarin, M.Si
NIK 19711108 201004 163 089

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

“Katakanlah: Sesungguhnya sembahyangku, ibadatku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam.”

(Q.S. Al An'aam ayat 162)

“Tiap kamu adalah pemimpin dan tiap-tiap kamu akan dimintai pertanggungjawaban.

(HR. Bukhori Muslim)”

“Jangan berhenti tangan mendayung nanti arus membawa hanyut.”

(M. Natsir)

Lebih baik menyalakan lilin daripada mengutuk kegelapan.

Persembahan :

Dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, maka Tesis ini saya persembahkan untuk : Ayahanda H. Usmandy S, S.Sos, M.Si dan Ibunda Hj. Agustinah, S.Pd.I, kedua adikku Erwin Laksamana dan Sekar Wulan Ramadhani serta seluruh keluarga besar. Terimakasih atas segala dukungan, doa, nasihat, serta kasih sayang tanpa henti yang diberikan kepada penulis, semoga keluarga kita senantiasa berada dalam lindungan dan bimbingan Allah SWT.

Seseorang yang Insyaallah akan selalu mendampingi dalam mengarungi kehidupan dunia dan akhirat.

ABSTRAK

Restrukturisasi organisasi pemerintah daerah merupakan kebijakan yang sangat penting terutama terkait dengan kebutuhan akan peningkatan kualitas pelayanan publik. Restrukturisasi organisasi tidak lagi dilakukan dalam paradigma pemenuhan kebutuhan internal birokrasi, tetapi harus berdasar pada kebutuhan pelayanan publik. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membawa perubahan yang signifikan terhadap pembentukan Perangkat Daerah, yakni dengan prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran berdasarkan beban kerja yang sesuai dengan kondisi masing-masing daerah. Sebagai salah satu bentuk tindaklanjut dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun struktur organisasi perangkat daerahnya.

Provinsi Kalimantan Barat merupakan daerah yang memiliki karakteristik khusus, yaitu wilayahnya berbatasan langsung dengan Malaysia. Selain karakteristik tersebut, Provinsi Kalimantan Barat juga memiliki kebutuhan yang sangat penting terutama menyangkut kebutuhan di bidang pendidikan, kesehatan dan infrastruktur. Dalam hal pelayanan publik, kepatuhan terhadap standar pelayanan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat masih belum optimal. Hasil penilaian yang dilakukan oleh Ombudsman perwakilan Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2016 masuk dalam kategori zona kuning dengan skor 59,81. Penilaian tersebut meskipun belum secara rinci menilai tentang kinerja pelayanan namun lebih pada aspek kepatuhan terhadap standar pelayanan, pengabaian terhadap standar pelayanan berpotensi dapat mengakibatkan buruknya kualitas pelayanan publik. Terhadap permasalahan dan tantangan yang kompleks tentang organisasi pemerintah daerah, studi mengenai restrukturisasi organisasi pemerintah daerah memiliki nilai urgensi yang tinggi.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Teknik analisis data yang digunakan adalah model interaktif yang meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui teknik wawancara secara mendalam terhadap informan. Sedangkan data sekunder diperoleh dengan melacak dokumentasi dari peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang dikeluarkan atau ditetapkan oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yang relevan dengan restrukturisasi organisasi perangkat daerah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa restrukturisasi organisasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat telah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan

menghasilkan 1 Sekretariat Daerah, 1 Sekretariat DPRD, 1 Inspektorat, 23 Dinas dan 7 Badan. Besaran organisasi perangkat daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat lebih ramping dibandingkan dengan sebelum dilaksanakan restrukturisasi organisasi, hal ini telah sesuai dengan prinsip perampingan dalam birokrasi pemerintah daerah agar lebih efektif dan efisien. Selanjutnya faktor yang paling mempengaruhi dalam restrukturisasi organisasi pemerintah Provinsi Kalimantan Barat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah adalah faktor kewenangan pemerintah yang dimiliki oleh daerah sedangkan faktor yang paling tidak mempengaruhi adalah faktor partisipasi publik.

Rekomendasi dalam penelitian ini adalah dalam melaksanakan restrukturisasi organisasi hendaknya dapat melakukan konsolidasi kewenangan sehingga tidak terjadi fragmentasi kewenangan pada masing-masing organisasi perangkat daerah dan akan membuat strukturnya lebih ramping agar lebih efektif dan efisien. Serta dalam melaksanakan restrukturisasi organisasi hendaknya dapat mempertimbangkan faktor partisipasi publik, karena partisipasi publik sangat dibutuhkan untuk menyusun organisasi perangkat daerah yang sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan pelayanan publik.

Kata Kunci : *Restrukturisasi organisasi, Pemerintah Daerah, Provinsi Kalimantan Barat*

ABSTRACT

Regional government organizational restructuring is a very important policy particularly related to the need of improving public service quality. The organizational restructuring is not conducted in the paradigm of fulfilling the need of internal bureaucracy anymore, but it has to be based on the need of public service for the community. Law Number 23 Year 2014 on Regional Government brings significant changes towards the formation of regional apparatus, with the principle of proper function and rightsizing based on work load which is appropriate with the real condition in each region. As the follow up from the Law Number 23 Year 2014, the central government issued Government Regulation Number 18 Year 2016 on Regional Apparatus as the guidance for the Regional Government to arrange the organizational structure of its local apparatus.

West Borneo Province is one of the provinces in Indonesia which has a special characteristic, in which its region has a directly adjacent with the neighboring country, Malaysia. Besides that, characteristic, West Borneo province also has important needs especially related to education, health and infrastructure. In terms of public service, the obedience of West Borneo government towards the service standard has not optimum yet. Based on the assessment conducted by the Ombudsman as the representative of West Borneo Province in 2016, the government of West Borneo Province is categorized in yellow zone with its score is 59.81. The assessment, even though has not assess the service performance in details but focuses more on the obedience towards service standards, the neglect towards service standard may potentially result in bad public service quality. Since there are complex problems and challenges related to local government organization; therefore, a study about local government organizational restructuring has a high urgency.

This study used qualitative method. The data analysis technique used was the interactive model which consist of data collection, data reduction, data display, and conclusions drawing. The data used were primary and secondary data. The primary data were gained through in-depth interview with the informants. While the secondary data were obtained by tracking documents from the legislations and policies issued or enacted by the government of West Borneo which are relevant to the regional apparatus organization restructuring.

The results showed that government organizational restructuring of west borneo province has been referring to Government Regulation Number 18 Year 2016 on regional apparatus and produce 1 Regional Secretariat; 1 Regional Legislative Council/DPRD Secretariat; 1 Inspectorate; 23 departments; and 7 agencies. The size of the government organizational of

west borneo province is slimmer than before the organizational restructuring, this is in accordance with the principle of downsizing in the local government bureaucracy to be more effective and efficient. Furthermore, the most influencing factor in the restructuring of the government organizational of west borneo province based on government regulation number 18 year 2016 on regional apparatus is government authority owned by province government, while the factor being considered the least is public participation..

The recommendation in this research is to carry out the restructuring of the organization should be able to consolidate the authority so that there is no fragmentation of authority in each organization of regional apparatus and will make the structure more lean to be more effective and efficient. As well as in carrying out the restructuring of the organization should be able to consider the factors of public participation, because public participation is needed to develop the organization of regional devices in accordance with the aspirations and needs of public services.

Keywords— Organizational Restructuring; Regional Government; West Borneo Province.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
LEMBAR REVISI	v
PENGESAHAN PROGRAM STUDI	vi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vii
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GRAFIK	xvi
DAFTAR GAMBAR	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
I.1 Latar Belakang	1
I.2 Rumusan Masalah	8
I.3 Tujuan Penelitian	9
I.4 Manfaat Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN TEORI	11
II. 1. Kajian Pustaka	11
II. 2. Kerangka Teori	22
II. 3. Definisi Konseptual.....	72
II. 4. Definisi Operasional	73
BAB III METODE PENELITIAN	76
III.1. Jenis Penelitian	76
III.2. Lokasi Penelitian.....	77
III.3. Jenis Data	77
III.4. Teknik Pengumpulan Data.....	80
III.5. Teknik Analisis Data	84
BAB IV DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN	87
IV. 1. Letak dan Luas wilayah	87
IV. 2. Penduduk	90
IV. 3. Visi, Misi dan Strategi Pembangunan.....	93
IV. 4. Kinerja Pembangunan Daerah	103
IV. 5. Kondisi Kelembagaan Sebelum Restrukturisasi.....	109
BAB V PEMBAHASAN	113
V. 1. Proses Restrukturisasi Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	113
V. 2. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Restrukturisasi Organisasi	124

BAB VI PENUTUP	222
VI. 1. Kesimpulan	222
VI. 2. Saran	223
DAFTAR PUSTAKA	224

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Rekap Penelitian Terdahulu	17
Tabel 2.2.	Perangkat Daerah Provinsi	45
Tabel 3.1	Ringkasan Jenis Data, Teknik Pengumpulan Data, dan Data Penelitian	83
Tabel 4.1.	Pembagian Wilayah Administratif di Kalimantan Barat.....	89
Tabel 4.2.	Jumlah dan Kepadatan Penduduk Per Kabupaten/ Kota Tahun 2015	92
Tabel 4.3.	Perkembangan APBD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2012-2016	103
Tabel 4.4.	Perkembangan Total Pendapatan Asli Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2012-2016.....	104
Tabel 4.5	Perkembangan dana perimbangan dalam APBD Provinsi Kalimantan Barat 2012 s.d 2016.....	105
Tabel 4.6	Perkembangan lain-lain Pendapatan yang Sah Dalam APBD Provinsi Kalimantan Barat 2012 s.d 2016	105
Tabel 4.7	Perkembangan Pembangunan Kalimantan Barat	106
Tabel 5.1	Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan Pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	115
Tabel 5.2	Konsep Kelembagaan Dari Tim SOPD Eksekutif	117
Tabel 5.3	Ringkasan Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Provinsi Kalimantan Barat Terhadap Raperda SOPD.....	119
Tabel 5.4	Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat	122
Tabel 5.5	Perbandingan Klasifikasi Urusan Pemerintahan	125
Tabel 5.6	Kewenangan Pemerintah Provinsi	126
Tabel 5.7	Perubahan Kewenangan Urusan Pemerintahan Konkruen.....	127
Tabel 5.8	Implikasi Kelembagaan Dari Faktor Kewenangan Pemerintah Yang Dimiliki Oleh Daerah	132
Tabel 5.9	Produk Domestik Regional Bruto Seri 2010 Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2013-2015	139
Tabel 5.10	Luas Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Barat	141
Tabel 5.11	Realisasi Produksi Tanaman Pangan (Ton) Tahun 2012-2015	142
Tabel 5.12	Realisasi Sub Sektor Holtikultura (Ton) Tahun 2012-2014.....	143
Tabel 5.13	Populasi Dan Produksi Sektor Peternakan Tahun 2012-2015	145
Tabel 5.14	Realisasi Produksi Sub Sektor Perkebunan (Ton) Tahun 2012-2015	146
Tabel 5.14	Kontribusi Dan Pertumbuhan Sektor Pertambangan	149
Tabel 5.16	Potensi Dan Produksi Sektor Perikanan.....	150
Tabel 5.17	Indikator Pembangunan Sektor Pendidikan Tahun 2014-2015.....	151
Tabel 5.18	Rasio Guru dan Murid SD, SMP, dan SMA tahun 2014-2015	153
Tabel 5.19	Kondisi Bidang Kesehatan Tahun 2012-2015	154

Tabel 5.20	Jumlah Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Puskesmas Keliling Tahun 2013-2015.....	157
Tabel 5.21	Cakupan Puskesmas Per Kecamatan.....	157
Tabel 5.22	Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan Tahun 2011-2015....	159
Tabel 5.23	Status dan Kondisi Jalan di Kalimantan Barat tahun 2012-2015..	160
Tabel 5.24	Implikasi Kelembagaan Dari Faktor Karakteristik, Potensi Dan Kebutuhan.....	166
Tabel 5.25	Perkembangan APBD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2012-2016	167
Tabel 5.26	Perkembangan Total Pendapatan Asli Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2012-2016.....	168
Tabel 5.27	Perkembangan Dana Perimbangan Dalam APBD Provinsi Kalimantan Barat 2012-2016.....	168
Tabel 5.28	Perkembangan Lain-Lain Pendapatan Yang Sah Dalam APBD Provinsi Kalimantan Barat 2012-2016	169
Tabel 5.29	Implikasi Kelembagaan Dari Faktor Kemampuan Keuangan Daerah.....	171
Tabel 5.30	OPD Usulan Pemerintah dan Hasil Pembahasan	174
Tabel 5.31	Jumlah dan Komposisi PNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016.....	177
Tabel 5.32	Perbandingan Jumlah dan Komposisi PNS Provinsi Kalimantan Barat.....	180
Tabel 5.33	Perbandingan PNS Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat berdasarkan jabatan.....	183
Tabel 5.34	PNS Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat berdasarkan jabatan	184
Tabel 5.35	PNS Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat berdasarkan Pendidikan	188
Tabel 5.36	Kerjasama Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat tahun 2014....	191
Tabel 5.37	Kerjasama Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2015...	197
Tabel 5.38	Kerjasama Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016...	203
Tabel 5.39	Rekap Kerjasama Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014-2016	205
Tabel 5.40	Perumpungan Urusan Pemerintahan	207
Tabel 5.41	Pola Kerjasama antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dengan Pemerintah Kabupaten/Kota	208
Tabel 5.42	Pola Kerjasama antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dengan Pemerintah Pusat	212
Tabel 5.43	Jadwal Kegiatan Pansus SOPD Provinsi Kalimantan Barat	217

DAFTAR GRAFIK

Grafik 4.1. Luas Wilayah Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat.....	90
Grafik 4.2. Penduduk Provinsi Kalimantan Barat Menurut Jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota Tahun 2015.....	93

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Lima Bagian Organisasi	43
Gambar 4.1. Peta Provinsi Kalimantan Barat.....	88